

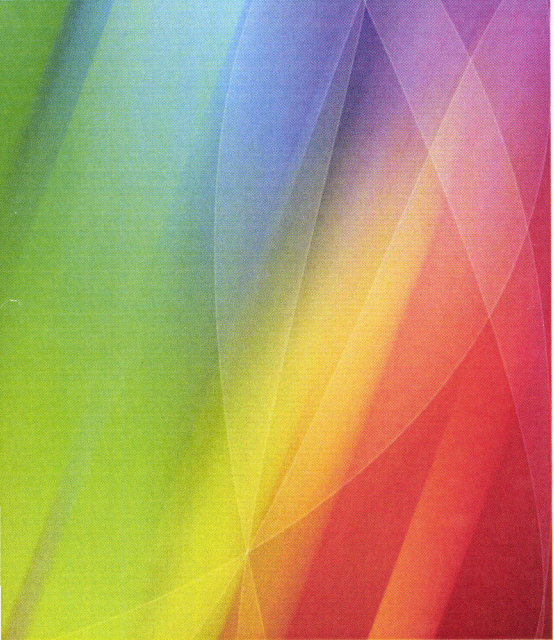


Bank Kata

OTONOMI DAERAH

Setditjen Otda
Ditjen Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI
April 2014

**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7-8
Jakarta Pusat



Bank Kata

**OTONOMI
DAERAH**

Setditjen Otda
Ditjen Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI
April 2014

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hinayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Bank Kata Otonomi Daerah ini.

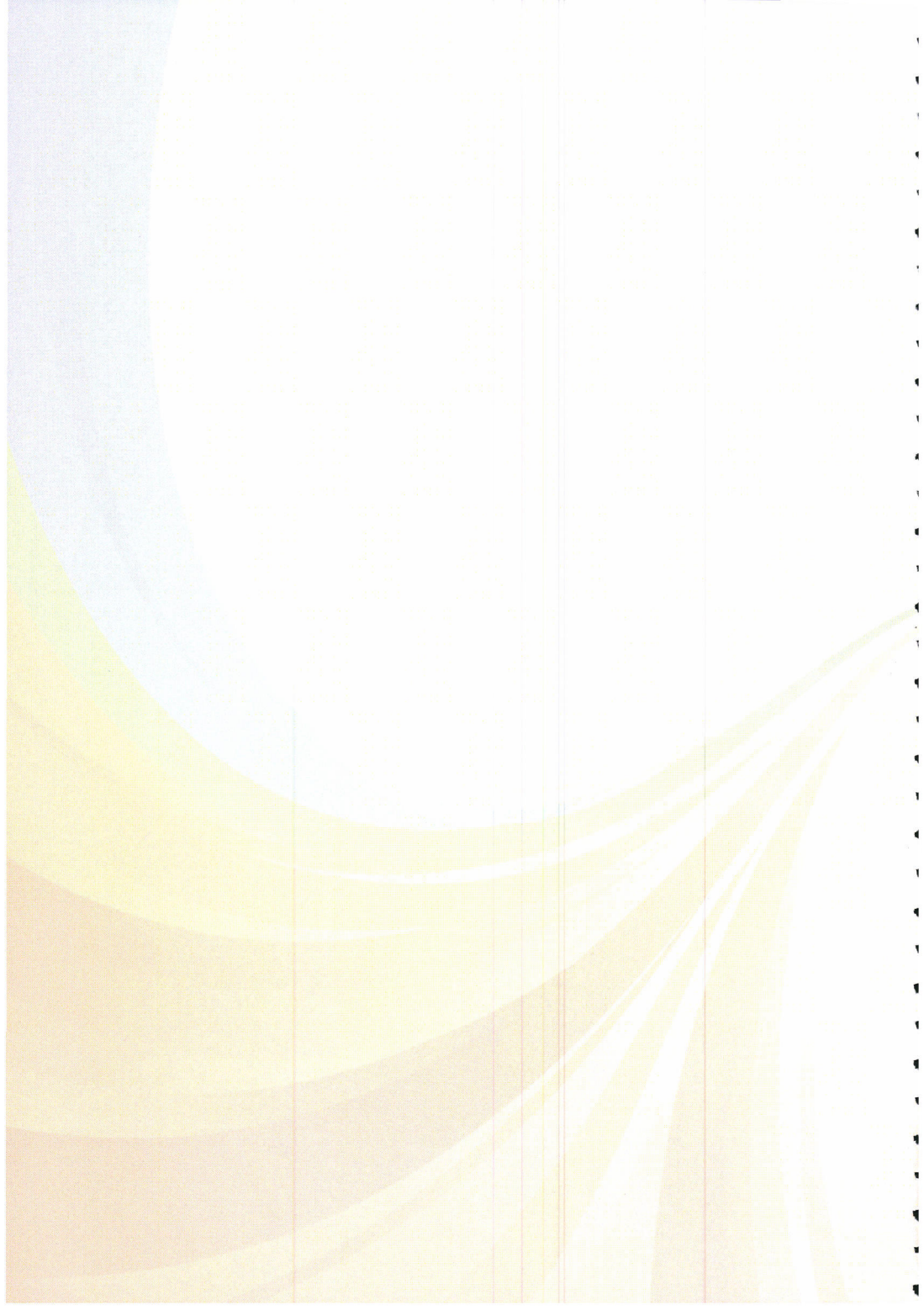
Buku Bank Kata Otonomi Daerah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman praktis bagi pembaca serta dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang istilah-istilah Otonomi Daerah, termaksud juga sebagai upaya menginternalisasikan tujuan dari desentralisasi dan otonomi daerah.

Kami sadari bahwa Buku Bank Kata Otda ini masih sangat sederhana untuk itu sebagai upaya pengembangan kedepannya kami secara terbuka mempersilahkan para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang positif serta membangun untuk kesempurnaan Buku Bank Kata Otda ini, sehingga dapat kami tingkatkan mutu dan substansi pada kesempatan berikutnya.

Jakarta, April 2014

Penyusun

**Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah
Bagian Perencanaan**



A

ADEKSI

Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia

Organisasi otonom dan independen terdiri dari 90 DPRD Kota dari seluruh Indonesia. ADEKSI didirikan pada tanggal 26 Juni 2001 sebagai bagian dari program desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah

ADKASI

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia

Organisasi yang anggotanya adalah DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan DPRD Kabupaten yang efektif dalam mendorong tata pemerintahan yang baik menuju pembangunan yang berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah dan demokrasi

Adendum

Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu

Administrasi Perencanaan

Keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan

Affirmative Action

hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi. Ia merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan

Afiliasi

Cara menghasilkan uang dengan menjual produk dari perusahaan atau lembaga pemilik produk (affiliate merchant), dengan bergabung menjadi pemasar produk (affiliate marketers), dan (hanya) dibayar setelah produk terjual

AFS

Application Forecasting Satker

Aplikasi Perencanaan penarikan dana yang berhubungan dengan rencana penambahan anggaran untuk tahun berikutnya

AIPD

Australia Indonesia Partnership for Decentralisation

Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kinerja pemerintah provinsi dan daerah. Lebih khusus, AIPD bertujuan untuk meningkatkan penyediaan layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur

Akun

Daftar transaksi keuangan yang tersusun di buku besar dan yang bertalian dengan jenis harta dan kewajiban tertentu yang dimiliki atau ditanggung gugat oleh orang atau perusahaan

Akuntabilitas

Kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi

Alokasi Anggaran

Besaran dana atau biaya yang disediakan atau dikeluarkan bagi suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan

Amandemen

adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. Berupa penambahan maupun pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya merubah sebagai (kecil) dari peraturan

American Political Science Association

Asosiasi profesional mahasiswa sarjana ilmu politik di Amerika Serikat

Analisa Jabatan

Proses penggambaran dan pencatatan informasi mengenai perilaku dan kegiatan pekerjaan

Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah

Analisis Kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi yang menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah

Anggaran

Suatu rencana sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (Periode) tertentu di masa yang akan datang

Anggaran Berbasis Kinerja

Penggunaan anggaran berdasarkan output yang dihasilkan. Menurut keputusan Menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 anggaran pendapatan belanja daerah (ABPD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, artinya sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran (output) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan

Aparatur

perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri)

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

APBD**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

APBN**Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember)

APBNP**Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan**

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara/ suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya dengan jangka waktu selama satu tahun dan disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (DPR)

APEKSI**Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia**

Terdiri dari pemerintah kota guna membantu pelaksanaan tugas-tugas, terutama dalam rangka mempercepat dan mendewasakan pelaksanaan otonomi daerah. APEKSI juga mempromosikan penerapan praktek-praktek yang baik dalam administrasi dan pemerintahan kota dan memberikan analisa kebijakan atas undang-undang dan peraturan

APINDO**Asosiasi Pengusaha Indonesia**

Wadah para pengusaha guna mewujudkan kepentingan dan tujuan bersama

APKASI

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia

Nomenklatur wadah kerjasama Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 30 Mei 2000 di Jakarta

Aplikasi

Suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna

APPSI

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

Wadah kerjasama antar Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia

Arsip

Koleksi penyimpanan catatan dan data-data, dan juga merujuk kepada tempat di mana catatan dan data-data ini disimpan

ASDEKSI

Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Suatu organisasi profesi yang Anggota dan Pengurusnya berasal dari Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini telah ada 489 Anggota sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota termasuk hasil pemekaran daerah tahun 2008

Assymetric Decentralization

Pelaksanaan Desentralisasi yang dilaksanakan dengan berbagai kekhususan dan keistimewaan

At Cost

Harga yang sebenarnya

Audit

Evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk

AWP

Annual Work Plan

Rencana Kerja Tahunan

B

Backlog

Pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus penggantian) ke pemberi pinjaman

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Sebuah unsur dari Kementerian Dalam Negeri yang mengelola terkait perbatasan negara Indonesia dengan negara lain maupun perbatasan antar daerah di wilayah NKRI

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri yang bertugas membina dan mengkoordinasikan semua unit pendidikan dan pelatihan di lingkungan kementerian dan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pemerintahan dalam negeri

Badan Penelitian dan Pengembangan

Komponen Kemendagri yang mempunyai misi meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian, dan pengembangan dibidang pemerintahan dalam negeri, meningkatkan memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan tersebut di kemendagri dan pemerintahahn daerah

Bagian Keuangan

Salah satu bagian dalam organisasi maupun yang memiliki tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran serta pembukuan dan verifikasi

Bagian Perencanaan

Salah satu bagian dalam organisasi yang bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebuah organisasi

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian

Bagian yang menangani penyusunan perundang-undangan dan masalah individu atau personal yang apabila hal ini diaplikasikan dalam organisasi adalah mengenai para pegawai atau karyawan

Bagian Umum

Salah satu bagian dalam organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi

Balance Score Card

Sebuah perencanaan strategis dan sistem manajemen yang digunakan secara ekstensif dalam bisnis dan industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk kegiatan usaha untuk menyelaraskan visi dan strategi organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, dan memantau kinerja organisasi terhadap strategis tujuan

Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Jabatan Kepala Bappenas dijabat sekaligus oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Baseline

Data tentang proses saat ini yang menyediakan matrik patokan untuk mengukur perbaikan dan untuk digunakan dalam perbandingan

BASICS

Better Approaches to Service Provision through Increased Capacities in Sulawesi

Proyek yang didanai oleh CIDA (Canadian International Development Agency) untuk peningkatan layanan di bidang kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan kapasitas para penyedia layanan

BAST

Berita Acara Serah Terima

Belanja Daerah

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Belanja Operasional

Belanja Operasional adalah Anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional yaitu kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor dan pembayaran yang terkait dengan operasional kantor

Bendahara Pengeluaran

orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka

pelaksanaan negara pada kantor satuan kerja kementerian / lembaga

Berita Acara

Naskah dengan isi yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain

Bimbingan Teknis

Pemberian bantuan sistematis kepada individu maupun kelompok, agar tahu, paham mau dan mampu mengembangkan, mengimplementasikan berbagai masalah yang dihaadapi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing

Black Campaign

Kampanye hitam

Penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. komunikasi ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih, kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya

Blokir Anggaran

Dana yang tidak bisa di pergunakan atau diserap melalui kegiatan karna data dukung tidak memenuhi syarat dan tidak lengkap

MK

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan

Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden

BPKP

Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah

Lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa

Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Buku Saku

Buku berukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku dan mudah dibawa ke mana-mana dan berisi informasi penting

BUMD

Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah, yang ditegaskan dalam peraturan pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

Badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara

Bupati

Dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia, bupati adalah kepala daerah untuk daerah kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota

C

Camat

Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota

Checkpoint

Target-antara dan target –akhir guna memudahkan pemahaman atas hasil pemantauan yang dilakukan, penilaian terhadap berhasil/gagalnya pencapaian sasaran program ditandai dengan menggunakan indikator-indikator

Checkpoint Renaksi

Checkpoint = target-antara dan target –akhir guna memudahkan pemahaman atas hasil pemantauan yang dilakukan, penilaian terhadap berhasil/gagalnya pencapaian sasaran program ditandai dengan menggunakan indikator-indikator

Renaksi = tindakan utilitas dalam jangka pendek untuk memenuhi pasokan dan tujuan permintaan rencana sumber daya terpadu

Cluster

Untuk mengurangi keborosan dalam melakukan manajemen terhadap struktur data di dalam hard disk, sehingga sistem berkas tidak akan mengalokasikan sektor disk fisik, tetapi sekumpulan sektor yang saling bedekatan

Coblos

menusuk hingga tembus

Common Sense

Kemampuan dasar untuk memahami, mengerti, dan menilai hal-hal yang dibagi oleh ("umum") hampir semua orang, dan cukup dapat diharapkan oleh hampir semua orang tanpa perlu debat

Complain

Keluhan, merupakan suatu wujud rasa ketidakpuasan customer dalam hal ini sangat berpengaruh besar dalam kemajuan sebuah perusahaan

Complain Handling

Cara Menyelesaikan masalah, menghadapi dan menyelesaikan sebuah complaint

Contreng

Memberi Tanda

CPNS

Calon Pegawai Negeri Sipil

Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. Mereka digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia

D

Daerah

Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional

Daerah Induk

Daerah yang merupakan induk dari daerah pemekaran

Daerah Khusus

Daerah-daerah yang berdasarkan amanat GBHN 1999 perlu ditangani secara khusus dalam rangka menuntaskan gejolak konflik yang mengarah pada disintegrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Aceh, Papua, Maluku dan Maluku Utara

Daerah Istimewa

Daerah yang mempunyai aturan pemerintahan khusus yg kadang-kadang menyimpang dr peraturan umum. Contoh: daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah Istimewa Aceh

Daerah Otonom

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Daerah Pemekaran

Pemecahan Provinsi atau Kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih

Daerah Tertinggal

Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional

Daftar Riwayat Hidup

Dokumen yang menjelaskan secara ringkas gambaran seseorang, apa yang telah lakukannya di masa lalu, apa relevansi pengalaman yang dimiliki terhadap pekerjaan yang sedang dilamar, sehingga dapat disimpulkan apakah orang tersebut tepat atau tidak untuk dipilih diantara kandidat lainnya

DAK**Dana Alokasi Khusus**

Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah

Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan

Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa

Dana Tugas Pembantuan Provinsi

Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan/atau Desa

Data

Catatan atas kumpulan fakta

Database

Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut

DAU**Dana Alokasi Umum**

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

DBH**Dana Bagi Hasil**

Direktorat adalah bagian dari departemen yang tugasnya mengurus suatu bidang tertentu, dikepalai oleh seorang direktur

Defisit Anggaran

Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja. Untuk APBD, Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah

Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu

Dekonstruksi

Sebuah metode pembacaan teks. Dengan dekonstruksi ditunjukkan bahwa dalam setiap teks selalu hadir anggapan-anggapan yang dianggap absolut

Demokrasi

Bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut

Demokratisasi

suatu perubahan baik itu perlahan maupaun secara cepat kearah demokrasi

Demonstrasi

Demonstrasi (dlm kamus Bhs Indonesia) ada dua makna, Pertama, pernyataan protes yang dikemukakan secara masal atau unjuk rasa. Kedua, peragaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau kelompok, misalnya demo masak, mendemonstrasikan pencak silat dll. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Unjuk rasa melalui demonstrasi adalah hak warga negara

Desa

"Wilayah yang jauh dari pusat keramaian kota, memiliki kondisi daerah yang masih alami, dihuni oleh penduduk yang relatif jarang, dan sebgaiian besar lahannya dimanfaatkan untuk pertanian sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah petani"

Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system negara kesatuan republik Indonesia

Diklat**Pendidikan dan Pelatihan**

suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan megutamakan pembinaan, kejujuran dan ketrampilan, penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil

Diklat Fungsional

Kegiatan dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu

Diklat PIM

Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan structural

Diklat Struktural

Pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku

Diklat Teknis

Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bidang tertentu, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS dengan kebutuhan instansi, serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat (PP Nomor 101 tahun 2000), dan dalam pelaksanaannya juga disesuaikan dengan tujuan serta kebutuhan instansi yang menyelenggarakan diklat tersebut

DIM**Daftar Inventarisasi Masalah**

Kumpulan Inventarisasi Permasalahan Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang

DIPA**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan pencairan dana atas bahan APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah

Direktorat

Bagian dari departemen yang tugasnya mengurus suatu bidang tertentu, dikepalai oleh seorang direktur

Disposisi

Merupakan petunjuk singkat tentang tindak lanjut (penyelesaian) terhadap suatu urusan atau surat masuk. Disposisi dibuat oleh pimpinan untuk staf atau bawahan sesuai dengan bidang keahlian atau kewenangannya

Ditjen**Direktorat Jenderal**

Direktorat jenderal (disingkat Ditjen) adalah unsur pelaksana pada kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya. Direktorat jenderal dipimpin oleh direktur jenderal (disingkat dirjen) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri

Ditjen Otda**Direktorat Jenderal Otonomi Daerah**

Direktorat jenderal yang unsur pelaksanaannya pada kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat jenderal Otonomi Daerah yang dipimpin oleh direktur jenderal (disingkat dirjen) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri

Ditjen Kesbangpol**Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik**

Direktorat jenderal yang unsur pelaksanaannya pada kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di Direktorat jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh direktur jenderal (disingkat Dirjen) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri

Ditjen Bangda**Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah**

Direktorat jenderal yang unsur pelaksanaannya pada kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di Direktorat jenderal Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh direktur jenderal (disingkat Dirjen) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri

Ditjen PMD**Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Direktorat jenderal yang unsur pelaksanaannya pada kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di Direktorat jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh direktur jenderal (disingkat Dirjen) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri

Direktur

Pemimpin tertinggi di suatu perusahaan; 2 kepala sekolah menengah; 3 kepala direktorat (dalam departemen); 4 orang yg bertugas memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, penerangan, dsb

Direktur Jenderal

Pimpinan di Direktorat Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidangnya

Diseminasi

Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut, faktor utamanya dapat mendukung perkembangan suatu

kegiatan praktik dalam suatu keilmuan tertentu adalah didasarkan dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian

Dit. FKDH DPRD dan HAL

Direktorat Fasilitas Kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hubungan Antar Lembaga

Direktorat yang melaksanakan sebagian tugas Ditjen Otonomi Daerah di bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Fasilitas Administrasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga

Dit. PD Otsus DPOD

Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Direktorat yang melaksanakan sebagian Tugas Ditjen Otonomi Daerah di bidang Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Fasilitas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Dit. PKEKD

Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah

Direktorat yang Melaksanakan Sebagian Tugas Ditjen Otonomi Daerah di Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah

Dit. Urusan Pemerintahan Daerah I

Direktorat yang Melaksanakan Sebagian Tugas Ditjen Otonomi Daerah yaitu Penyusunan Perumusan Dan Fasilitas Serta Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Nspk, Urusan Pemerintahan Daerah dan SPM Seperti di Bidang Urusan Pemerintahan Daerah yang Meliputi Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, KB dan Keluarga Sejahtera Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pertanian, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang, Kehutanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan, Komunikasi Dan Informasi, Pendidikan, Perindustrian, Perumahan, Pekerjaan Umum Serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dit. Urusan Pemerintahan Daerah II

Direktorat yang Melaksanakan Sebagian Tugas Ditjen Otonomi Daerah yang Mempunyai Fungsi Penyusunan Perumusan Dan Fasilitas Serta Monev Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Penyusunan NSPK, SPM dan NSPK dan Kriteria Pelaksanaan Urusan, Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri yang bertugas mensosialisasikan dan advokasi kebijakan administrasi kependudukan serta media berkomunikasi (Paperless) secara efektif dan efisien guna tertib dengan pelayanan prima

Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

Di dalam Permendagri 41/2010 mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur yang mempunyai fungsi koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perUUan dan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha dan RT

Ditjen Keuangan Daerah

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut

Ditjen Pembangunan Daerah

Unsur pelaksana kementerian dalam negeri di bidang pembangunan daerah yang bertanggungjawab kepada menteri dalam negeri yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang keuangan daerah

Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa

Unsur pelaksana kementerian dalam negeri di bidang pembangunan daerah yang bertanggungjawab kepada menteri dalam negeri yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang keuangan daerah

Ditjen Pemerintahan Umum

Unsur pelaksana kementerian dalam negeri di bidang pemerintahan umum bertanggungjawab kepada menteri dalam negeri yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang pemerintahan umum

DKTP

Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu

DOB**Daerah Otonom Baru**

Daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaranbadan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara UmumDaerah

DP3**Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)**

Penilaian yang diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh pejabat penilai, yang dituangkan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

DPD**Dewan Pimpinan Pusat**

Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum

DPOD**Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah**

Sebuah forum konsultasi ditingkat pusat bertanggung-jawab kepada presiden, yang memiliki tugas mengenai: 1. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah. 2. perimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. kemampuan daerah kabupaten dan kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu

DPR**Dewan Perwakilan Rakyat**

Salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat

DPRD**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945

DPT**Daftar Pemilih Tetap**

Data kependudukan milik pemerintah dan pemerintah daerah yang telah dimutakhirkan oleh KPU untuk keperluan pemilu. DPT ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota. Data kependudukan sendiri terdiri dari data penduduk dan data penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4). Jadi, dalam menetapkan DPT KPU menggunakan data kependudukan yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan

Draft

Rancangan atau konsep (surat, dsb) disusun oleh dua orang dari kedua belah pihak

E

EDOHP

Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran

Efektif

Pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan

Efisien

Penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimal

Ekonomi

Salah satu dan bagian dari ilmu sosial yang khusus mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa Secara umum

Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lainnya

EKPOD

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah

EKPPD

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja

EKPPD

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja

Eksekutif

Salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggungjawab untuk menerapkan hukum. Figur paling senior dalam sebuah cabang eksekutif disebut kepala

pemerintahan Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer

E-KTP

Elektronik Kartu Tanda Penduduk

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional

Email

Sebuah fasilitas komunikasi dalam Internet yang berfungsi mengirim surat secara elektronik yang dapat menjangkau ke seluruh dunia. Dibandingkan dengan surat biasa, e-mail mempunyai keunggulan yang lebih aman serta tidak membedakan jarak dan waktu

EPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk

e-Procurement

e-procurement adalah pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer

Eselon

Tingkat jabatan struktural. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Evaluasi

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan

Evaluasi Kinerja

Penilaian prestasi (Performance Appraisal), proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya

F

Fasilitasi

Memungkinkan atau menjadikan lebih mudah

Facebook

Sebuah web jejaring sosial yang didirikan oleh mark zuckerberg dan diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya

FGD

Focus Group Discussion

Prose pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok

Film Documenter

Film yang mendokumentasikan suatu kenyataan

Finger Print

Suatu metode yang bertujuan untuk mengungkapkan potensi genetik (bawaan sejak lahir) seseorang dalam kaitannya dengan bakat, kecerdasan, kecenderungan karakter, dan motivasi

G

GAM

Gerakan Aceh Merdeka

Sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya Aceh, yang merupakan daerah yang sempat berganti nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Gender

Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara wanita dan pria baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya

Geospasial

Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihian

GIS

Geographical Information System

Aplikasi pengolahan data spasial dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan menggabungkan antara data grafis dengan data atribut obyek menggunakan peta dasar digital (basic map) bergeoreferensi bumi. Saat ini GIS berkembang pesat dan banyak diimplementasikan di segala bidang seperti pendidikan, kesehatan, geografi, cuaca, kependudukan, jaringan perpipaan dan lain-lain. Pada dasarnya GIS menampilkan dan memberikan percepatan data-data yang diinginkan oleh pengguna dimana terdahulu hanya menggunakan metode manual namun saat ini menggunakan metode digital (Komputerisasi)

GIZ

German International Cooperation

Good Governance (Tata Pemerintahan yang Baik)

Suatu tata pemerintahan atau Governance (lihat Governance/Tata Pemerintahan) yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip (yang kemudian dikenal dengan "Sepuluh Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik"), antara lain : Partisipasi, Penegakan Hukum, mewujudkan adanya penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil Transparansi, Responsivness/Tanggap, Kesetaraan, Visi Strategis, Efektifitas dan Efisiensi, Profesionalisme, Ekuntabilitas dan Pengawasan

Governance (Tata Pemerintahan)

Suatu mekanisme interaksi para pihak terkait yang berada di lembaga pemerintahan, legislatif dan masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok (perusahaan, asosiasi, LSM dan lain-lain) untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum atau administratif tertentu. (Hasil Kesepakatan Bersama antara Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia)

Governance Finance Statistic (GFS)

Sistem pengumpulan data statistik keuangan mengenai kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan negara, dalam format yang sesuai untuk analisa ekonomi dan dapat diterima secara internasional

Goody bag

Tas pengemas souvenir atau barang oleh-oleh

Grant atau Hibah Luar Negeri

Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali

Grand Design

Rancangan Besar

GU

Ganti Uang

Pekerjaan yang dilaksanakan terlebih dahulu setelah kegiatan

Gubernur

Kepala daerah untuk wilayah provinsi

H

Hak Angket

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Hak Interpelasi

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

HAM

Hak Asasi Manusia

Hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal

Hari Otonomi Daerah

Peringatan dalam rangka memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dimulai sejak Kepres No. 11 Tahun 1996

Harmonisasi

Upaya mencari keselarasan

Hibah Langsung

Hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan atas pencairan dananya dilaksanakan

tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara (Permenkeu RI No.191/PMK.05/2011)

Hibah Luar Negeri

Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang di Rupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali

Hitung Cepat

Quick Count

Sebuah metode guna memverifikasi hasil-hasil pemilihan dengan cara memproyeksikannya dari sampel-sampel yang didapat pada TPS-TPS

Honorarium

Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu

1

Ibu Kota

Kota utama di sebuah negara atau daerah meskipun kota ini belum tentu yang paling besar

Ibu Kota Provinsi

Kota utama di sebuah negara atau daerah meskipun kota ini belum tentu yang paling besar. Di kota ini biasanya terdapat gedung-gedung pemerintahan pusat atau daerah dan sebuah dewan perwakilan rakyat yang seringkali disebut parlemen serta kantor-kantor pusat perusahaan-perusahaan komersial. Selain itu di ibu kota negara biasanya juga terdapat perwakilan-perwakilan dari negara asing yang biasa disebut kedutaan besar.

Daftar Ibu Kota Provinsi:

No.	Nama Provinsi	Nama Ibu Kota
1	Provinsi Aceh	Banda Aceh
2	Provinsi Sumatera Utara	Medan
3	Provinsi Sumatera Barat	Padang
4	Provinsi Riau	Pekan Baru

5	Provinsi Kepulauan Riau	Tanjung Pinang
6	Provinsi Jambi	Jambi
7	Provinsi Sumatera Selatan	Palembang
8	Provinsi Bangka Belitung	Pangkal Pinang
9	Provinsi Bengkulu	Bengkulu
10	Provinsi Lampung	Bandar Lampung
11	Provinsi DKI Jakarta	Jakarta
12	Provinsi Jawa Barat	Bandung
13	Provinsi Banten	Serang
14	Provinsi Jawa Tengah	Semarang
15	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta
16	Provinsi Jawa Timur	Surabaya
17	Provinsi Bali	Denpasar
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang
20	Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor
21	Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak
22	Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya
23	Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin
24	Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda
25	Provinsi Sulawesi Utara	Manado
26	Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Palu
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari
29	Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar

30	Provinsi Gorontalo	Gorontalo
31	Provinsi Maluku	Ambon
32	Provinsi Maluku Utara	Ternate
33	Provinsi Papua Barat	Manokwari
34	Provinsi Papua	Jayapura

IGA**Indonesian Government Award**

Salah satu penghargaan mulai tahun 2007 yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dinyatakan berhasil dalam pelaksanaan pemerintahan bidang tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah dan pemberdayaan masyarakat. IGA meliputi 3 indikator : program inovatif, replikasi program inovatif dan sumber pembiayaan program inovatif

IGI**Indonesian Government Index**

Sebuah kerangka untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan daerah

IGOS**Indonesian Go Open Source**

Gerakan pemerintah yang terus dikakukan dan disosialisasikan dalam rangka memperkuat sistem teknologi informasi nasional serta pemanfaatan perkembangan teknologi informasi global melalui pengembangan dan pemanfaatan Open Source Software

IKAPTK**Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan**

Subuah keluarga yang bertujuan soliditas alumni dalam mendukung kemajuan almamater, menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintahan yang bersih, memajukan kehidupan masyarakat, serta meningkatkan profesionalitas, dan integritas anggota sebagai simpul pemersatu bangsa, serta perekat negara kesatuan Republik Indonesia

IKK**Indikator Kinerja Kunci**

Indikator yang dipakai untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi sebagai tolak ukur untuk menilai aktivitas-aktivitas yang sulit diukur seperti keuntungan pengembangan kepemimpinan, perjanjian, layanan dan kepuasan

IKU**Indikator Kinerja Utama**

Indikator yang dipakai untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi sebagai tolak ukur untuk menilai aktivitas-aktivitas yang sulit diukur seperti keuntungan pengembangan kepemimpinan, perjanjian, layanan dan kepuasan

ILGR**Initiatives for Local Governance Reform**

Tatanan pengelolaan pemerintahan yang baik

ILPPD

Laporan atas penyelenggaraan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah

Implementasi

Penerapan/pelaksanaan.

Incumbent

Posisi seseorang yang sedang menjabat sebagai kepala daerah dan hendak ikut dalam pilkada lagi

Indikator

Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

Indeks Pembangunan Manusia

Suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah sebagai indeks komposit yang secara generic terdiri dari 3 komponen utama, yaitu : 1. Kawasan Pemerintah; 2. Perkembangan Wilayah; 3. Kebudayaan Masyarakat

Informasi

Pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan

Inkonsistensi

Ketidakserasian, penjelasan yang berbeda-beda dari pemerintah tentang kasus yang memperlihatkan adanya diantara aparat

Instrumen

Alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variable

Inventarisasi

Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah

IPDN**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

Salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Pada 10 Oktober 2007, dalam sebuah sidang kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk mengubah IPDN menjadi Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menyusul terungkapnya kasus kekerasan yang terjadi di IPDN

ITJEN**Inspektorat Jenderal**

Salah satu unit kerja di lingkungan kementerian dalam negeri, sebagai unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri dalam negeri yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian dalam negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota

Jabatan Fungsional

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi

Jalan Desa

Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan

Jalan Lingkungan

Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah

Jalan Penghubung

Jalan yang menghubungkan antara desa yang satu ke sebrang

Jalan Utama

Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum

Job Description

Point-point pekerjaan yang diberikan pada calon tenaga kerja, misalnya Mampu membuat laporan keuangan, mampu membuat laporan hasil test, dll

Judicial Review

(hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku

Juklak**Petunjuk Pelaksanaan**

Suatu petunjuk kegiatan mempersiapkan bagaimana suatu pekerjaan akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan

Juknis**Petunjuk Teknis**

Acuan bagi penyelenggara dan masyarakat dalam suatu kegiatan

Jurnal

Alat untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi diperusahaan yang dilakukan secara kronologis (berdasarkan urutan waktu terjadinya) dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, sebelum dibukukan kedalam buku besar, harus dicatat dahulu kedalam jurnal, oleh karena itu buku jurnal sering disebut buku catatan pertama (book of original entry)

K

Kabag**Kepala Bagian**

Pimpinan yang bertanggungjawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan

Kabid**Kepala Bidang**

Pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan

perencanaan pembangunan, mengendalikan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Kabinet

Suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. Kabinet dapat pula disebut sebagai **Dewan Menteri**, Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif, penyebutan ini tergantung pada sistem pemerintahannya dan diketuai oleh presiden atau perdana menteri sebagai pimpinan kabinet

Kabupaten

Pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati.

Daftar Kabupaten: (Tabel)

Nanggroe Aceh Darussalam

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Aceh Barat	Meulaboh
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	Blangpidie
3	Kabupaten Aceh Besar	Kota Jantho
4	Kabupaten Aceh Jaya	Calang
5	Kabupaten Aceh Selatan	Tapak Tuan
6	Kabupaten Aceh Singkil	Singkil
7	Kabupaten Aceh Tamiang	Karang Baru
8	Kabupaten Aceh Tengah	Takengon
9	Kabupaten Aceh Tenggara	Kutacane
10	Kabupaten Aceh Timur	Idi Rayeuk
11	Kabupaten Aceh Utara	Lhoksukon
12	Kabupaten Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong
13	Kabupaten Bireuen	Bireuen
14	Kabupaten Gayo Lues	Blang Kejeren
15	Kabupaten Nagan Raya	Suka Makmue
16	Kabupaten Pidie	Sigli
17	Kabupaten Pidie Jaya	Meureudu
18	Kabupaten Simeulue	Sinabang

Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Asahan	Kisaran
2	Kabupaten Batu Bara	Limapuluh
3	Kabupaten Dairi	Sidikalang
4	Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul

6	Kabupaten Karo	Kabanjahe
7	Kabupaten Labuhanbatu	Rantau Prapat
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan
10	Kabupaten Langkat	Stabat
11	Kabupaten Mandailing Natal	Panyabungan
12	Kabupaten Nias	Gunung Sitoli
13	Kabupaten Nias Barat	Lahomi
14	Kabupaten Nias Selatan	Teluk Dalam
15	Kabupaten Nias Utara	Lotu
16	Kabupaten Padang Lawas	Sibuhuan
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	Gunung Tua
18	Kabupaten Pakpak Bharat	Salak
19	Kabupaten Samosir	Pangururan
20	Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah
21	Kabupaten Simalungun	Raya
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sipirok
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan
24	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung
25	Kabupaten Toba Samosir	Balige
26	Kota Binjai	Binjai Kota

Bengkulu

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kota Manna
2	Kabupaten Bengkulu Tengah	Karang Tinggi
3	Kabupaten Bengkulu Utara	Arga Makmur
4	Kabupaten Kaur	Bintuhan, Kaur Selatan
5	Kabupaten Kepahiang	Kepahiang
6	Kabupaten Lebong	Muara Aman
7	Kabupaten Mukomuko	Mukomuko
8	Kabupaten Rejang Lebong	Curup
9	Kabupaten Seluma	Tais

Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Batang Hari	Muara Bulian

2	Kabupaten Bungo	Muara Bungo
3	Kabupaten Kerinci	Sungaipenuh
4	Kabupaten Merangin	Bangko
5	Kabupaten Muaro Jambi	Sengeti
6	Kabupaten Sarolangun	Sarolangun
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kuala Tungkal
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak
9	Kabupaten Tebo	Muara Tebo

Riau

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bengkalis	Bengkalis
2	Kabupaten Indragiri Hilir	Tembilahan
3	Kabupaten Indragiri Hulu	Rengat
4	Kabupaten Kampar	Bangkinang
5	Kabupaten Kuantan Singingi	Teluk Kuantan
6	Kabupaten Pelalawan	Pangkalan Kerinci
7	Kabupaten Rokan Hilir	Ujung Tanjung (<i>de jure</i>), Bagan Siapi-api (<i>de facto</i>)
8	Kabupaten Rokan Hulu	Pasir Pengarayan
9	Kabupaten Siak	Siak Sri Indrapura
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	Selatpanjang

Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Agam	Lubuk Basung
2	Kabupaten Dharmasraya	Pulau Punjung
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tuapejat
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	Sarilamak
5	Kabupaten Padang Pariaman	Parit Malintang
6	Kabupaten Pasaman	Lubuk Sikaping
7	Kabupaten Pasaman Barat	Simpang Empat
8	Kabupaten Pesisir Selatan	Painan
9	Kabupaten Sijunjung	Muaro Sijunjung
10	Kabupaten Solok	Arosuka
11	Kabupaten Solok Selatan	Padang Aro
12	Kabupaten Tanah Datar	Batusangkar

Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Banyuasin	Banyuasin
2	Kabupaten Empat Lawang	Tebing Tinggi
3	Kabupaten Lahat	Lahat
4	Kabupaten Muara Enim	Muara Enim
5	Kabupaten Musi Banyuasin	Sekayu
6	Kabupaten Musi Rawas	Lubuk Linggau
7	Kabupaten Ogan Ilir	Indralaya
8	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kayu Agung
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Baturaja
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Muaradua
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Martapura

Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Lampung Barat	Liwa
2	Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda
3	Kabupaten Lampung Tengah	Gunungsugih
4	Kabupaten Lampung Timur	Sukadana
5	Kabupaten Lampung Utara	Kotabumi
6	Kabupaten Mesuji	?
7	Kabupaten Pesawaran	Gedong Tataan
8	Kabupaten Pringsewu	?
9	Kabupaten Tanggamus	Kotaagung
10	Kabupaten Tulang Bawang	Menggala
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat	?
12	Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu

Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bangka	Sungailiat
2	Kabupaten Bangka Barat	Toboali
3	Kabupaten Bangka Selatan	Mentok
4	Kabupaten Bangka Tengah	Koba
5	Kabupaten Belitung	Tanjungpandan
6	Kabupaten Belitung Timur	Manggar

Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bintan	Bandar Seri Bentan
2	Kabupaten Karimun	Tanjung Balai Karimun
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	Tarempa
4	Kabupaten Lingga	Daik, Lingga
5	Kabupaten Natuna	Ranai, Bunguran Timur

**Jawa
Banten**

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Lebak	Rangkasbitung
2	Kabupaten Pandeglang	Pandeglang
3	Kabupaten Serang	-
4	Kabupaten Tangerang	Tangerang

Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bandung	Soreang
2	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah
3	Kabupaten Bekasi	Bekasi
4	Kabupaten Bogor	Cibinong
5	Kabupaten Ciamis	Ciamis
6	Kabupaten Cianjur	Cianjur
7	Kabupaten Cirebon	Sumber
8	Kabupaten Garut	Garut
9	Kabupaten Indramayu	Indramayu
10	Kabupaten Karawang	Karawang
11	Kabupaten Kuningan	Kuningan
12	Kabupaten Majalengka	Majalengka
13	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta
14	Kabupaten Subang	Subang
15	Kabupaten Sukabumi	Sukabumi
16	Kabupaten Sumedang	Sumedang
17	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna

DKI Jakarta

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pulau Pramuka

Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara
2	Kabupaten Banyumas	Purwokerto
3	Kabupaten Batang	Batang
4	Kabupaten Blora	Blora
5	Kabupaten Boyolali	Boyolali
6	Kabupaten Brebes	Brebes
7	Kabupaten Cilacap	Cilacap
8	Kabupaten Demak	Demak
9	Kabupaten Grobogan	Purwodadi
10	Kabupaten Jepara	Jepara
11	Kabupaten Karanganyar	Karanganyar
12	Kabupaten Kebumen	Kebumen
13	Kabupaten Kendal	Kendal
14	Kabupaten Klaten	Klaten
15	Kabupaten Kudus	Kudus
16	Kabupaten Magelang	Mungkid
17	Kabupaten Pati	Pati
18	Kabupaten Pekalongan	Kajen
19	Kabupaten Pemalang	Pemalang
20	Kabupaten Purbalingga	Purbalingga
21	Kabupaten Purworejo	Purworejo
22	Kabupaten Rembang	Rembang
23	Kabupaten Semarang	Ungaran
24	Kabupaten Sragen	Sragen
25	Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo
26	Kabupaten Tegal	Slawi
27	Kabupaten Temanggung	Temanggung
28	Kabupaten Wonogiri	Wonogoro
29	Kabupaten Wonosobo	Wonosobo

Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bangkalan	Bangkalan
2	Kabupaten Banyuwangi	Banyuwangi
3	Kabupaten Blitar	Blitar
4	Kabupaten Bojonegoro	Bojonegoro
5	Kabupaten Bondowoso	Bondowoso

6	Kabupaten Gresik	Gresik
7	Kabupaten Jember	Jember
8	Kabupaten Jombang	Jombang
9	Kabupaten Kediri	Kediri
10	Kabupaten Lamongan	Lamongan
11	Kabupaten Lumajang	Lumajang
12	Kabupaten Madiun	Madiun
13	Kabupaten Magetan	Magetan
14	Kabupaten Malang	Kepanjen
15	Kabupaten Mojokerto	Mojokerto
16	Kabupaten Nganjuk	Nganjuk
17	Kabupaten Ngawi	Ngawi
18	Kabupaten Pacitan	Pacitan
19	Kabupaten Pamekasan	Pamekasan
20	Kabupaten Pasuruan	Pasuruan
21	Kabupaten Ponorogo	Ponorogo
22	Kabupaten Probolinggo	Probolinggo
23	Kabupaten Sampang	Sampang
24	Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo
25	Kabupaten Situbondo	Situbondo
26	Kabupaten Sumenep	Sumenep
27	Kabupaten Trenggalek	Trenggalek
28	Kabupaten Tuban	Tuban
29	Kabupaten Tulungagung	Tulungagung

Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bantul	Bantul
2	Kabupaten Gunung Kidul	Wonosari
3	Kabupaten Kulon Progo	Wates
4	Kabupaten Sleman	Sleman

Nusa Tenggara**Bali**

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Badung	Badung
2	Kabupaten Bangli	Bangli
3	Kabupaten Buleleng	Singaraja
4	Kabupaten Gianyar	Gianyar

5	Kabupaten Jembrana	Negara
6	Kabupaten Karangasem	Karangasem
7	Kabupaten Klungkung	Klungkung
8	Kabupaten Tabanan	Tabanan

Nusa Tenggara Barat

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bima	Raba
2	Kabupaten Dompu	Dompu
3	Kabupaten Lombok Barat	Mataram
4	Kabupaten Lombok Tengah	Praya
5	Kabupaten Lombok Timur	Selong
6	Kabupaten Lombok Utara	Tanjung
7	Kabupaten Sumbawa	Sumbawa Besar
8	Kabupaten Sumbawa Barat	Taliwang

Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Kupang	Kupang
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Soe
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kefamenanu
4	Kabupaten Belu	Atambua
5	Kabupaten Alor	Kalabahi
6	Kabupaten Flores Timur	Larantuka
7	Kabupaten Sikka	Maumere
8	Kabupaten Ende	Ende
9	Kabupaten Ngada	Bajawa
10	Kabupaten Manggarai	Ruteng
11	Kabupaten Sumba Timur	Waingapu
12	Kabupaten Sumba Barat	Waikabubak
13	Kabupaten Lembata	Lewoleba
14	Kabupaten Rote Ndao	Baa
15	Kabupaten Manggarai Barat	Labuan Bajo
16	Kabupaten Nagekeo	Mbay
17	Kabupaten Sumba Tengah	Waibakul
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	Tambolaka
19	Kabupaten Manggarai Timur	Borong
20	Kabupaten Sabu Raijua	?

Kalimantan**Kalimantan Barat**

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bengkayang	Bengkayang
2	Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau
3	Kabupaten Kayong Utara	Sukadana
4	Kabupaten Ketapang	Ketapang
5	Kabupaten Kubu Raya	Sungai Raya
6	Kabupaten Landak	Ngabang
7	Kabupaten Melawi	Nanga Pinoh
8	Kabupaten Pontianak	Mempawah
9	Kabupaten Sambas	Sambas
10	Kabupaten Sanggau	Batang Tarang
11	Kabupaten Sekadau	Sekadau
12	Kabupaten Sintang	Sintang

Kalimantan Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Balangan	Paringin
2	Kabupaten Banjar	Martapura
3	Kabupaten Barito Kuala	Marabahan
4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kandangan
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Barabai
6	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai
7	Kabupaten Kotabaru	Kotabaru
8	Kabupaten Tabalong	Tanjung
9	Kabupaten Tanah Bumbu	Batulicin
10	Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari
11	Kabupaten Tapin	Rantau

Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Barito Selatan	Buntok
2	Kabupaten Barito Timur	Tamiang
3	Kabupaten Barito Utara	Muara Teweh
4	Kabupaten Gunung Mas	Kuala Kurun
5	Kabupaten Kapuas	Kuala Kapuas
6	Kabupaten Katingan	Kasongan
7	Kabupaten Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun

8	Kabupaten Kotawaringin Timur	Sampit
9	Kabupaten Lamandau	Nanga Bulik
10	Kabupaten Murung Raya	Purukcahu
11	Kabupaten Pulang Pisau	Pulang Pisau
12	Kabupaten Sukamara	Sukamara
13	Kabupaten Seruyan	Kuala Pembuang

Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Berau	Tanjungredep
2	Kabupaten Bulungan	Tanjungselor
3	Kabupaten Kutai Barat	Sendawar
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong
5	Kabupaten Kutai Timur	Sangatta
6	Kabupaten Malinau	Malinau
7	Kabupaten Nunukan	Nunukan
8	Kabupaten Paser	Tanah Grogot
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	Penajam
10	Kabupaten Tana Tidung	Tideng Pale

Sulawesi**Gorontalo**

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Boalemo	Marisa/Tilamuta
2	Kabupaten Bone Bolango	Suwawa
3	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo
4	Kabupaten Gorontalo Utara	Kwandang
5	Kabupaten Pohuwato	Marisa

Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bantaeng	Bantaeng
2	Kabupaten Barru	Barru
3	Kabupaten Bone	Watampone
4	Kabupaten Bulukumba	Bulukumba
5	Kabupaten Enrekang	Enrekang
6	Kabupaten Gowa	Sunggu Minasa
7	Kabupaten Jeneponto	Jeneponto
8	Kabupaten Kepulauan Selayar	Benteng
9	Kabupaten Luwu	Palopo

10	Kabupaten Luwu Timur	Malili
11	Kabupaten Luwu Utara	Masamba
12	Kabupaten Maros	Maros
13	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Pangkajene
14	Kabupaten Pinrang	Pinrang
15	Kabupaten Sidenreng Rappang	Sidenreng
16	Kabupaten Sinjai	Sinjai
17	Kabupaten Soppeng	Watan Soppeng
18	Kabupaten Takalar	Takalar
19	Kabupaten Tana Toraja	Makale
20	Kabupaten Toraja Utara	Rantepao
21	Kabupaten Wajo	Sengkang

Sulawesi Tenggara

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bombana	Rumbia
2	Kabupaten Buton	Bau-Bau
3	Kabupaten Buton Utara	Buranga
4	Kabupaten Kolaka	Kolaka
5	Kabupaten Kolaka Utara	Lasusua
6	Kabupaten Konawe	Unaaha
7	Kabupaten Konawe Selatan	Andolo
8	Kabupaten Konawe Utara	Wanggudu
9	Kabupaten Muna	Raha
10	Kabupaten Wakatobi	Wangi-Wangi

Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Banggai	Luwuk
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	Banggai
3	Kabupaten Buol	Buol
4	Kabupaten Donggala	Donggala
5	Kabupaten Morowali	Bungku
6	Kabupaten Parigi Moutong	Parigi
7	Kabupaten Poso	Poso
8	Kabupaten Tojo Una-Una	Ampana
9	Kabupaten Toli-Toli	Toli-Toli
10	Kabupaten Sigi	Sigi Biromaru

Sulawesi Utara

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	Kotamobagu
2	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Bolaang Uki
3	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Tutuyan
4	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Boroko
5	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Tahuna
6	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Ondong Siau
7	Kabupaten Kepulauan Talaud	Melonguane
8	Kabupaten Minahasa	Tondano
9	Kabupaten Minahasa Selatan	Amurang
10	Kabupaten Minahasa Tenggara	Ratahan
11	Kabupaten Minahasa Utara	Airmadidi

Sulawesi Barat

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Majene	Majene
2	Kabupaten Mamasa	Mamasa
3	Kabupaten Mamuju	Mamuju
4	Kabupaten Mamuju Utara	Pasangkayu
5	Kabupaten Polewali Mandar	Polewali

Maluku dan Papua**Maluku**

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Buru	Namlea
2	Kabupaten Buru Selatan	Namrole
3	Kabupaten Kepulauan Aru	Oobo
4	Kabupaten Maluku Barat Daya	Tiakur
5	Kabupaten Maluku Tengah	Masohi
6	Kabupaten Maluku Tenggara	Tual
7	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Saumlaki
8	Kabupaten Seram Bagian Barat	Dataran Hunipopo
9	Kabupaten Seram Bagian Timur	Dataran Hunimoa

Maluku Utara

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Halmahera Barat	Jailolo
2	Kabupaten Halmahera Tengah	Weda
3	Kabupaten Halmahera Utara	Tobelo

4	Kabupaten Halmahera Selatan	Labuha
5	Kabupaten Kepulauan Sula	Sanana
6	Kabupaten Halmahera Timur	Maba
7	Kabupaten Pulau Morotai	Morotai Selatan

Papua

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Asmat	Agats
2	Kabupaten Biak Numfor	Biak
3	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
4	Kabupaten Deiyai	Tigi
5	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
6	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
7	Kabupaten Jayapura	Sentani
8	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
9	Kabupaten Keerom	Waris
10	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui
11	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
12	Kabupaten Mamberamo Raya	Burmeso
13	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
14	Kabupaten Mappi	Kepi
15	Kabupaten Merauke	Merauke
16	Kabupaten Mimika	Timika
17	Kabupaten Nabire	Nabire
18	Kabupaten Nduga	Kenyam
19	Kabupaten Paniai	Enarotali
20	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
21	Kabupaten Puncak	Ilaga
22	Kabupaten Puncak Jaya	Kotamulia
23	Kabupaten Sarmi	Sarmi
24	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
25	Kabupaten Tolikara	Karubaga
26	Kabupaten Waropen	Botawa
27	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
28	Kabupaten Yalimo	Elelim

Papua Barat

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Fakfak	Fakfak
2	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4	Kabupaten Maybrat	Kumurkek
5	Kabupaten Raja Ampat	Waisai
6	Kabupaten Sorong	Sorong
7	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
8	Kabupaten Tambrauw	Fef
9	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
10	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

Kajian

Kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang

KAK**Kerangka Acuan Kerja**

Dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan

Kampanye

Sebuah tindakan bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang teroganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, juga dapat dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian

Kampanye Hitam

Lihat Black Campaign

Kapus**Kepala Pusat**

Pimpinan tertinggi dalam suatu Pusat

Karo**Kepala Biro**

Pimpinan tertinggi dalam suatu Biro

Kasi**Kepala Seksi**

Pimpinan yang membantu atasannya yang mempunyai fungsi perencanaan penyusunan program dan kegiatan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan seksi pimpinan

Kasubag**Kepala Sub Bagian**

Seseorang yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi untuk membantu kepala bagian dan sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dalam suatu instansi maupun perusahaan

Kasubdit**Kepala Sub Direktorat**

Kepala Sub Direktorat pada suatu Kementerian

Kebijakan anggaran

Garis kebijakan pemerintah dalam penetapan pengeluaran dan penerimaan Negara dalam rangka mencapai tujuan ekonomi nasional.

Kecurangan Pilkada

Kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kecurangan itu dilakukan mulai dari peserta pemilu kepala daerah sampai ke pejabat penyelenggaraan pilkada

Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerjasama SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

Kemampuan dan Potensi Daerah

Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM

Kementerian

Lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

Daftar Kementerian: (Tabel)

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Kemiskinan

Keadaan terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian tempat berlindung, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya

Kemitraan

Kerjasama usaha/kongsi/joint venture baik dengan pelaku usaha secara pribadi maupun dengan Perusahaan dalam maupun luar negeri

Kepala Badan

Pimpinan tertinggi dalam suatu Badan di suatu Instansi

Kepala Daerah

Pimpinan yang dikepalai oleh kepala Pemerintah Daerah

Kepala Desa

Pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Kepala Dinas

Pimpinan tertinggi dalam suatu SKPD di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota

Kepala Kantor

Pimpinan tertinggi di kantor

Kepmen

Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini

Kepres

Keputusan Presiden

Peraturan yang dibuat oleh presiden yang bersifat mengatur untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa kegiatan pelaksanaan administrasi negara

Kesejahteraan (Rakyat)

Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut

Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Kewenangan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

KIB II

Kabinet Indonesia Bersatu II

kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menteri, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007

Kinerja

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi

KKN

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Korupsi Perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka, **kolusi** merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar, **Nepotisme** berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori

Kinerja

Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

Klarifikasi

Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan-persamaan ciri

Kodam

Komando Daerah Militer

Komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat. Kodam merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI. Sebuah Kodam dipimpin oleh seorang Panglima Kodam atau disingkat Pangdam

Kodim

Komando Distrik Militer

Komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat di bawah Korem Kodim membawahi beberapa Komando Rayon Militer (*Koramil*)

Kolusi

Kerjasama secara diam-diam untuk maksud tidak terpuji

Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia

Konsinyering

adalah pengumpulan/proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, ruang rapat lainnya) untuk menggarap pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung

Konstitusi

Sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya

Korem

Komando Resort Militer

Komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat di bawah

Kodam. Korem membawahi beberapa Komando Distrik Militer atau *Kodim*, satuan pendukung seperti Polisi Militer, Zeni Bangunan, Pembekalan dan Angkutan, Peralatan, Perhubungan, Kesehatan dan lainnya

Kotak Suara

Kotak tempat mengumpulkan surat hasil pemungutan suara

KPPOD

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

adalah lembaga independen pemantauan pelaksanaan otonomi daerah yang lahir dari sebuah pemikiran bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana di atur dalam Undang Undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu dicermati terus menerus demi keberhasilannya demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat di semua bagian negara berdasarkan potensi dan keanekaragamannya tanpa meninggalkan prinsip kesatuan Republik Indonesia

KPPN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara

Kompetensi

Pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang, dan dapat diraih setiap waktu. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap-sikap dasar dalam melakukan sesuatu. Kebiasaan berpikir dan bertindak itu didasari oleh budi pekerti luhur baik dalam kehidupan pribadi, sosial, kemasyarakatan, keber-agama-an, dan kehidupan berbangsa dan bernegara

Komponen

Unsur-unsur dalam sebuah Kementerian/Lembaga

Koordinasi

Mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yg akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur

Korupsi

korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Kota

Kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.

Daftar Kota: (Tabel)

Aceh

No	Nama Kota
1	Kota Banda Aceh
2	Kota Langsa
3	Kota Lhokseumawe
4	Kota Sabang
5	Kota Subulussalam

Sumatera Utara

No	Nama Kota
1	Kota Binjai
2	Kota Gunungsitoli
3	Kota Medan
4	Kota Padangsidempuan
5	Kota Pematangsiantar
6	Kota Sibolga
7	Kota Tanjungbalai
8	Kota Tebing Tinggi

Sumatera Barat

No	Nama Kota
1	Kota Bukittinggi
2	Kota Padang
3	Kota Padangpanjang
4	Kota Pariaman
5	Kota Payakumbuh
6	Kota Sawahlunto
7	Kota Solok

Riau

No	Nama Kota
1	Kota Dumai
2	Kota Pekanbaru

Kepulauan Riau

No	Nama Kota
1	Kota Batam
2	Kota Tanjung Pinang

Jambi

No	Nama Kota
1	Kota Jambi
2	Kota Sungai Penuh

Bengkulu

No	Nama Kota
1	Kota Bengkulu

Sumatera Selatan

No	Nama Kota
1	Kota Lubuklinggau Lubuklinggau -
2	Kota Pagar Alam
3	Kota Palembang
4	Kota Prabumulih

Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Kota
1	Kota Pangkal Pinang

Lampung

No	Nama Kota
1	Kota Bandar Lampung
2	Kota Metro

Jawa

No	Nama Kota
1	Kota Tangerang
2	Kota Serang
3	Kota Cilegon

Jawa Barat

No	Nama Kota
1	Kota Bandung
2	Kota Banjar
3	Kota Bekasi
4	Kota Bogor
5	Kota Cimahi
6	Kota Cirebon
7	Kota Depok
8	Kota Sukabumi
9	Kota Tasikmalaya

DKI Jakarta

No	Nama Kota
1	Kota Administrasi Jakarta Barat
2	Kota Administrasi Jakarta Pusat
3	Kota Administrasi Jakarta Selatan
4	Kota Administrasi Jakarta Timur
5	Kota Administrasi Jakarta Utara

Jawa Tengah

No	Nama Kota
1	Kota Magelang
2	Kota Pekalongan
3	Kota Salatiga
4	Kota Semarang
5	Kota Surakarta
6	Kota Tegal

Jawa Timur

No	Nama Kota
1	Kota Batu
2	Kota Blitar
3	Kota Kediri
4	Kota Madiun
5	Kota Malang
6	Kota Mojokerto
7	Kota Pasuruan
8	Kota Probolinggo
9	Kota Surabaya

Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama Kota
1	Kota Yogyakarta

Bali

No	Nama Kota
1	Kota Denpasar

Nusa Tenggara Barat

No	Nama Kota
1	Kota Bima
2	Kota Mataram

Nusa Tenggara Timur

No	Nama Kota
1	Kota Kupang

Kalimantan Barat

No	Nama Kota
1	Kota Pontianak
2	Kota Singkawang

Kalimantan Selatan

No	Nama Kota
1	Kota Banjarbaru
2	Kota Banjarmasin

Kalimantan Tengah

No	Nama Kota
1	Kota Palangka Raya

Kalimantan Timur

No	Nama Kota
1	Kota Bontang
2	Kota Samarinda

Kalimantan Utara

No	Nama Kota
1	Kota Tarakan

Gorontalo

No	Nama Kota
1	Kota Gorontalo

Sulawesi Selatan

No	Nama Kota
1	Kota Makassar
2	Kota Palopo
3	Kota Parepare

Sulawesi Tenggara

No	Nama Kota
1	Kota Bau-Bau
2	Kota Kendari

Sulawesi Tengah

No	Nama Kota
1	Kota Palu

Sulawesi Utara

No	Nama Kota
1	Kota Bitung
2	Kota Kotamobagu
3	Kota Manado
4	Kota Tomohon

Maluku

No	Nama Kota
1	Kota Ambon
2	Kota Tual

Maluku Utara

No	Nama Kota
1	Kota Ternate
2	Kota Tidore Kepulauan

Papua

No	Nama Kota
1	Kota Jayapura

Papua Barat

No	Nama Kota
1	Kota Sorong

KPPS

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

"pelaksana Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS)"

KPU

Komisi Pemilihan Umum

Komisi yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia

KPUD

Komisi Pemilihan Umum Daerah

Komisi yang melakukan supervisi terhadap pelaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu.

KY

Komisi Yudisial

Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.

L**LAKIP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik

Laporan PP 39

Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus,/deficit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan anggarannya dalam satu periode untuk K/L

Laporan Triwulan

Suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban tiga bulan baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang (authority) dan tanggung jawab (responsibility) yang ada antara mereka.

Launching

Sebuah proses melempar suatu lini produk yang baru ke masyarakat melalui metode-metode dan tujuan-tujuan tertentu.

Legislatif

Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.

Lelang

Proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi

Lelang Jabatan

Semua pihak di lingkungan Pemerintahan/Instansi terkait yang sesuai syarat yang dibutuhkan, diberi kesempatan untuk melamar pekerjaan sebagai pejabat di lingkungan Pemerintahan/Instansi tersebut.

Lemhanas**Lembaga Pertahanan Nasional**

Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional dan pementapan nilai-nilai kebangsaan.

LHE**Laporan Hasil Evaluasi**

Laporan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya.

LKPJ**Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban**

Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1

(satu) anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPR

Lokakarya

Suatu acara pembelajaran yang ditujukan kepada orang-orang yang akan berdiskusi mengenai suatu masalah tertentu dan mencari solusi atau jalan keluarnya.

LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPR

LPNK

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Daftar LPNK: (Tabel)

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan atas penyelenggaraan daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah

LS

Langsung

Pembayaran Pekerjaan yang dilakukan secara langsung kepada pihak pelaksana pekerjaan.

Lurah

Kepala pemerintahan tingkat Kelurahan



MA

Mahkamah Agung

Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mabes Polri

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia

Mabes TNI

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, membawahkan seluruh daerah di Indonesia, dipimpin oleh KAPOLRI

Maintanance

Suatu Proses dalam perbaikan account

Macro Community Development Method

Salah satu metode yang dijadikan azas pemberdayaan masyarakat dalam realisasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Metode ini berupaya memperluas wawasan aparat Pemda dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep: (1) pembangunan berlandaskan pada kemampuan masyarakat; (2) penciptaan Community Center sebagai basis perencanaan pembangunan; dan (3) peningkatan partisipasi komunitas masyarakat

Masyarakat

Sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut

Media Publikasi

"Alat yang diginaka untuk menyediakan/menyebarkan sebuah informasi masyarakat umum dengan cara bermacam macam mulai dari buku, teks, gambar, konten audio visual, website, cd dan mp3.Kata publikasi berarti melakukan kegiatan penerbitan atau penyalinan."

Media Sosial

Sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Meeting

Istilah bahasa inggris yang berarti rapat, pertemuan atau persidangan.

Mendagri

Anggota kabinet sebagai pembantu presiden yang mengepalai kementerian dalam negeri dan menjalankan tugas sesuai kementeriannya

MK

Mahkamah Konstitusi

Lemaba tinggi negara yang memegang kekuasaan hukum bersama dengan

Mahkamah Agung, Penyusunnya adalah Presiden dan 3 orang dari MA. Mahkamah Konstitusi memiliki Tugas pokok tersendiri yaitu 1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; 2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara.

Money Politics

Politik uang

Suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).

Monitoring dan Evaluasi

Kinerja penerapan dan pencapaian smp pemerintah daerah dilakukan oleh pimpinan dibantu oleh tim konsultasi penyusunan SPM

Mono Executive

Penyelenggara pemerintahan secara tunggal (hanya oleh kepala daerah atau tidak berpasangan)

Moratorium

Otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan

MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Musrenbang

Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

N

Negara

Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu

Nepotisme

Lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya

Newsletter

Suatu media publikasi yang memuat berita tentang informasi penting dan diterbitkan secara berkala

NIK

Nomor Induk Kependudukan

Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata

NIP

Nomor Induk Pegawai

Nomor identitas pegawai negeri sipil yang berfungsi sebagai nomor asuransi social pegawai dan sebagai dasar pengaturan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian

NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

Nota Dinas

Alat komunikasi tertulis intern antar pejabat dilingkungan komponen dilingkungan Departemen Dalam Negeri yang memuat/berisi pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarisan atau pematangan sesuatu kebijaksanaan atau proses penyesuaian persoalan/masalah

Nota Kesepakatan

Sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU tidak seformal sebuah kontrak

NSPK

Norma, Standar, Prosedur dan Kinerja

Nusantara

Nusantara berasal dari dua kata yaitu nusa dan antara. Nusa merupakan istilah Jawa kuno yang mempunyai arti pulau. Antara mengandung makna ada sesuatu yang diapit. Nusantara berarti pulau yang mengapit. Jika diperluas dapat diartikan sebagai kepulauan yang saling terikat satu sama lain

O

OBC

Otda Bike Community

Nama group sepeda yang berada di komponen otda

Obligasi Daerah

Pinjaman daerah yang ditawarkan kepada public melalui penawaran umum di pasar modal

Off Budget

Mekanisme penganggaran di luar DIPA

OGI

Open Government Indonesia

Sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif

Ombudsman

Lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, yang dibentuk UU No.37 tahun 2008 disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 9 september 2008

Online

Terhubungnya PC ke jaringan internet atau sedang berbicara dengan seseorang melalui pesawat telepon

OPM**Organisasi Papua Merdeka**

Sebuah organisasi yang didirikan tahun 1965 dengan tujuan membantu dan melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri dari Indonesia, dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas

Optimalisasi

Mengacu pada pemilihan elemen terbaik dari beberapa set alternatif yang tersedia

Ormas**Organisasi Massa**

Suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis

Otonomi

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan, otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independence

Otonomi Daerah

Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Otonomi Khusus

Salah satu bagian dari hak untuk menentukan nasib sendiri

Output

Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan

P**P4B**

Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan

P4B

Percepatan Pembangunan Papua dan Papua barat
Lihat UP4B

PAD

Pendapatan Asli Daerah

Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pagu

Batas tertinggi anggaran; plafon anggaran

Pagu Definitif

Pagu final yang akan di jadikan acuan untuk tahun Anggaran tahun berikutnya

Pagu Indikatif

Perkiraan anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pajak Daerah

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pakta Integritas

Pernyataan / janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan perundang-undangan dan keangguapan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme

Pamong Praja

Perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah

Panitia Teknis

Organisasi dalam sistem standarisasi nasional yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN, yang beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu dan mewakili pihak yang berkepentingan, bertugas melakukan perumusan Rancangan SNI (RSNI) dan pemeliharaan SNI.

Panja RUU

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang

Panitia yang dibentuk guna membahas rancangan suatu undang-undang.

Parasamya Purnakarya Nugraha

Anugerah atas pekerjaan yang baik atau sempurna untuk (kepentingan) semua orang yang diberikan kepada Provinsi/Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan lima tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat

Partisipasi Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi

Partai politik

Sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa aktivis yang mempunyai orientasi dan cita-cita yang kurang lebih sama dan bertujuan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ideology partainya melalui cara-cara konstitusional

Pasangan Calon KDH dan WKDH

peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan

PAW

Pengganti Antar Waktu
Pergantian Anggota

PBAK

Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi

Upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada sektor swasta, masyarakat, dan aparat pemerintah agar berperilaku anti korupsi.

Pedoman

Kumpulan ketentuan dasar yg memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan

Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan

Pembangunan Daerah

Suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut

Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan dan penghapusan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain

Pemberdayaan

Upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya

Pembiayaan

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Pemekaran Daerah

Pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya

Pemeringkatan

Kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan

Pemerintah Pusat

Sebutan yang umum untuk pemerintah suatu negara kesatuan

Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Langsung

Salah satu mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin dengan melibatkan masyarakat secara langsung tanpa diwakilkan oleh orang lain.

Pemungutan Suara

Voting

Pemilihan hakim atau pemimpin dengan cara mencatat nama yang terpilih atau sejenisnya atau dengan voting.

Penanganan Pengaduan

Lihat Complain Handling

Pendapatan Daerah

Pemasukan ke kas daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintahan daerah.

Penerapan 15 SPM

"Penerapan = suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya

SPM (standar pelayanan minimal) = ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal 15 SPM terdiri dari bidang kesehatan, lingkungan hidup, sosial, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, ketahanan pangan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, kominfo, kesenian, perhubungan, penanaman modal dan pemerintahan dalam negeri."

Penetapan Kinerja

Tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja, sebagai janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung

Pengadaan Barang dan Jasa

"Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan/Kerja/Perangkat/Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa."

Pengadilan Negeri

Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pengadilan Tinggi

Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pengaduan

Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan, kepada pejabat yang berwenang untuk menindak lanjuti menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan (Pasal 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Pengembangan Kapasitas

Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah, menteri / pimpinan lembaga pemerintah non kementerian

Penggabungan Daerah

Penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

adalah Inspektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran

Penghapusan Daerah

Pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota

Penghematan

Membelanjakan uang pada kebutuhan yang bermanfaat dengan tidak berlebihan.

Penjabat

Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.

Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).

Perda**Peraturan Daerah**

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota)

Perdais**Peraturan Daerah Istimewa**

Peraturan daerah istimewa yang dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.

Perdasi**Peraturan Daerah Provinsi**

Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perdasus**Peraturan Daerah Khusus**

Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU 21/2001.

Perencanaan

Proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain—pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan—tak akan dapat berjalan.

Perencanaan Partisipatif

Bentuk nyata penerapan prinsip demokrasi dalam alokasi sumberdaya publik. Kedua, munculnya dukungan kerangka hukum yang memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur urusan daerahnya, termasuk di dalamnya urusan perencanaan dan pengalokasian anggaran.

Perimbangan Keuangan

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan operasional pembangunan daerah setiap tahun.

Permen**Peraturan Menteri**

Peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Perpres**Peraturan Presiden**

Perundang-undangan yang dibuat oleh presiden suatu negara.

Perppu**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kementingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pertahanan

Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pertanggungjawaban

Sebuah laporan yang memuat data mengukur perencanaan (dengan anggaran) dan pelaksanaan (dengan hasil aktual) dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban, sehingga dapat dilihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam suatu pekerjaan.

Petunjuk Operasional Kegiatan

Petunjuk bagi pejabat pelaksana teknis dalam melakukan suatu kegiatan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dalam DIPA

PHLN**Pinjaman Hibah Luar Negeri**

Kesepakatan tertulis mengenai pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) antara pemerintah dan pemberi PHLN.

PIAK**Penilaian Inisiatif Anti Korupsi**

Alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Pidato

Sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal

Pinjaman Daerah

Semua transaksi yang mengakibatkan Daerah yang menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali

PJ**Penjabat**

Pemegang jabatan orang lain untuk sementara

PLH**Pelaksana Harian**

Pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan kewenangan karena pejabat definitif berhalangan sementara.

PLT**Pelaksana Tugas**

Pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.

PMK**Peraturan Menteri Keuangan**

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang mengatur tentang suatu hal sesuai dengan tugas pokok organisasinya.

PMPRB**Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assesement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

PNPM**Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat**

Program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNS

Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pointers

Petunjuk/arahan tertulis seorang pimpinan

POK**Petunjuk Operasional Kegiatan**

Pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian.

Pokja**Kelompok Kerja**

"Sekumpulan orang, terdiri atas 2 anggota atau lebih yang : mempunyai tujuan yang sama, mempunyai kepentingan sama, saling bekerjasama, saling berhubungan, memiliki rasa ikut bertanggung jawab, dan saling tergantung satu dengan lainnya"

Politik

Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Politik Uang**Lihat Money Politics**

Suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Politisasi

Hal membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dsb) bersifat politis

Politisasi Birokrasi

Membuat agar organisasi birokrasi bekerja dan berbuat sesuai dengan kepentingan politik yang berkuasa.

Polres**Kepolisian Resort**

Kepolisian Resor, membawahkan 1 Kabupaten, dipimpin oleh polisi berpangkat AKBP.(Kombes untuk Polda Jaya)

Polsek**Kepolisian Sektor**

Kepolisian Sektor, membawahkan 1 Kecamatan, dipimpin oleh polisi berpangkat AKP.(Kapol untuk Polda Jaya)

Polwil**Kepolisian Wilayah**

Biasanya membawahkan beberapa kabupaten/kota sekaligus, seperti Polwil Semarang dipimpin oleh polisi berpangkat KOMBES

Polda**Kepolisian Daerah**

Membawahkan 1 propinsi, dipimpin oleh polisi berpangkat Brigjen/Irjen (Irjen biasanya untuk daerah strategis)

PP**Peraturan Pemerintah**

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

PPID**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik

PPIP**Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan**

Kegiatan di Direktorat Pengembangan Permukiman yang memfokuskan pada perdesaan dengan kemajuan infrastruktur diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di daerah tersebut

PPK**Pejabat Pembuat Komitmen**

Kepala Bagian Umum, pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu Inspektur Jenderal dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian, mengadakan ikatan/perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan

Praja

bermakna negeri, kota serta berasal dari Indonesia

Program

Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Prosedur

adalah suatu bagian system yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam

Provinsi

Nama sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional. Kata ini merupakan kata pungutan dari bahasa Belanda "provincie" yang berasal dari bahasa Latin dan pertama kalinya digunakan di Kekaisaran Romawi. Mereka membagi wilayah kekuasaan mereka atas (peringkat kedua dari seluruh kepresidensial setelah kekuasaan presiden

PTUN**Pengadilan Tata Usaha Negara**

Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha negara dengan warga negara. PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya.

Publikasi

Konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum.

Q

Qanun

Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh

Quick Count

Lihat Hitung Cepat

Quick Win

Program yang mengawali reformasi birokrasi yang diharapkan dalam waktu singkat dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders

R

RAB

Rencana Anggaran Biaya

Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut.

Radiogram

Telegram yang dikirimkan melalui media elektronik seperti fax, tv, email, dlsb

Rapat

Lihat Meeting

Rapat Kerja

Hal penting dan harus dilakukan secara rutin demi keberhasilan sebuah tugas.

Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Pertemuan yg diadakan untuk mendengarkan penjelasan atau pendapat seseorang yg berwenang mengenai pelaksanaan kegiatan dsb yg ada dl batas tugas dan kewenangannya (anggota masyarakat, lembaga atau badan pemerintah, dsb)

Rasionalisasi

Mekanisme pertahanan yang dianggap sebagai perilaku yang kontroversial atau perasaan yang dijelaskan secara rasional atau logis untuk menghindari penjelasan yang benar.

RB**Reformasi Birokrasi**

Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia aparatur

Realisasi

Pelaksanaan Sesuatu sehingga menjadi nyata

Regulasi

Mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dalam tindakan perilaku

Remunerasi

Pembayaran atau penggajian, bisa juga uang atau substitusi dari uang yang ditetapkan dengan peraturan tertentu sebagai timbal balik suatu pekerjaan dan bersifat rutin dimana tidak termasuk uang lembur atau honor

Renaksi**Rencana Aksi**

Tindakan utilitas dalam jangka pendek untuk memenuhi pasokan dan tujuan permintaan rencana sumber daya terpadu

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2008

Rencana Pencapaian SPM

Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar

Renja**Rencana Kerja**

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah

Retribusi

Iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjukkan. Paksaan disini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dan tidak dikenakan iuran itu. Misalnya retribusi pasar, parkir, dll

Retribusi Daerah

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

Revisi

Peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan

RKA/KL**Rencana Kerja Anggaran/ Kementerian Lembaga**

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian / lembaga yang merupakan penjabaran dan rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

RKP**Rencana Kerja Pemerintah**

Pejabaran dari RPJM Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi, makro termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal, moneter, prioritas, pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD**Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun

Roadmap

Peta jalan atau bisa juga acuan untuk mencapai sesuatu dalam hal ini adalah kekayaan.

RPJM**Rencana Pembangunan Jangka Menengah**

Dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun anggaran

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat

RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun

RPJPN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RPP

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan masih berupa draft yang akan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya

RUU DOB

Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru

RUU Kepulauan

Rancangan Undang-Undang Kepulauan

RUU Pemda

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

RUU Pilkada

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas dan berupa draft.

RUU PPDK

Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan

Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan yang dibahas oleh Panitia Khusus Pansus RUU PPDK

RUUK

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan

Rancangan Undang-Undang yang membahas tentang Daerah Keistimewaan

S

Satker

Satuan Kerja

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang Merupakan Bagian Dari Suatu Unit Organisasi Pada Kementerian Negara/Lembaga yang Melaksanakan Satu atau Beberapa Kegiatan dari Suatu Program

SBK

Standar Biaya keluaran

Besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

SBU

Standar Biaya Umum

Satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

SCBD

Sustainable Capacity Building Development

Suatu program lintas sektoral untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitasnya dalam memberikan pelayanan bagi publik dan melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintahan lainnya.

SE

Surat Edaran

Surat pemberitahuan secara tertulis yang diedarkan serta ditujukan kepada berbagai pihak

Segment

Tipe untuk objek-objek yang Versisten

SEKJEN

Sekretaris Jenderal

Pemimpin dari Sekretariat Jenderal

Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah (disingkat setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (disingkat sekda)

Sekretariat Ditjen

Unsur pelaksana pada kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya

Sekretariat Jenderal

Unsur pembantu pemimpin dalam kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan kementeriannya

Sekretaris Daerah

Pembantu kepala daerah yang bertugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah

Self-Blocking

Penundaan pencairan pelaksanaan anggaranya

Semesteran

Semesteran merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar-mengajar suatu program dalam suatu jenjang pendidikan

Seminar

Persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang

Sentralisasi

Pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI

Server

Suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client dalam suatu jaringan komputer. Server dilengkapi dengan sistem operasi khusus untuk mengontrol akses dan sumber daya yang ada di dalamnya biasanya sistem operasi khusus tersebut disebut sistem operasi jaringan atau network operating system

SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi

Sinergitas

Menggabungkan dua atau lebih perusahaan dengan tujuan hasil atau output yang dihasilkan bisa menjadi lebih baik dan maksimal dengan mendatangkan keuntungan berlipat ganda

Single Executive

Lihat Mono Executive

Sinkronisasi

Proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan

SISMONTEP

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi TEPPA

SKB

Surat Keputusan Bersama

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh beberapa orang yang didalamnya memuat kesepakatan bersama.

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah

SOP

Standar Operasional Petunjuk

Tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu

Sosialisasi

Proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat

SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

SPK

Surat Perintah Kerja

Surat perintah kerja yang digunakan oleh perusahaan manufaktur dalam mengerjakan pesanan pelanggan, sehingga akan terlihat laba rugi per SPK

SPM**Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal

SPM**Surat Perintah Membayar**

adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA

SPM-LS**Surat Perintah Membayar Langsung**

adalah surat perintah membayar langsung yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada pihak ketiga (rekanan) atas perjanjian kontrak kerja (Surat Perintah Kerja) atau yang sejenisnya

SPM – UP**Surat Perintah Membayar Persediaan**

Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membayar kegiatan operasional kantor sehari-hari

SPM-GU**Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan**

Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan membebani DIPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai

SPM – TU**Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan**

Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran karena kebutuhan dananya melebihi dari Pagu Uang Persediaan yang ditetapkan

SP2D**Surat Perintah Pencairan Dana**

Surat atau dokumen yang diterbitkan oleh kuasa BUD yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD yang diterbitkan oleh KPPN

SPP**Surat Permintaan Pembayaran**

Surat Permintaan Pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna

Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM

SPPD

Surat Perintah Perjalanan Dinas

Surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas

SPTJM KPA

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran

Staf Ahli

Orang yang ditugaskan memberikan masukan bagi sang Menteri sebelum membuat atau melepaskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan bisa maksimal.

Stranas PPRG

Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Suap

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum

Sub Direktorat

Bagian dari direktorat yang dipimpin oleh seorang kepala

Subbag Data dan Informasi

Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Subbag Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal.

Subbag Penyusunan Program dan Anggaran

Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan program dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

Substansi

‘Yang membentuk sesuatu,’ atau yang pada dasarnya merupakan sesuatu atau dapat disempitkan menjadi itu. Pembahasan mengenai substansi akan selalu terkait dengan esensi (essence)

Substansial

Bersifat inti, sesungguhnya.

Sultan

Sultan adalah nama untuk anak Laki-Laki di mana nama tersebut berasal dari India/Hindu dengan pengertian, definisi atau arti nama raja.

SE**Surat Edaran**

Surat dengan alamat tujuan kolektif yang beredar dari satu tangan ke tangan lainnya dengan cara mengirimkan satu surat untuk semua orang yang dituju (sirkuler), atau semua orang yang dituju mendapat surat yang sama isinya

SEB**Surat Edaran Bersama**

Surat yang dibuat dan dikeluarkan lebih dari satu Kementerian/Lembaga

Surat Kontrak

Surat perjanjian kesepakatan antara pihak pengontrak dan pihak yang dikontrak dan mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi akan adanya hak, kewajiban dan wewenang kedua belah pihak

Surel

Surat elektronik, Lihat Email

Surat Suara

Surat yang digunakan untuk meyalurkan aspirasi masyarakat waktu pemilihan

**Talk show**

Talk Show adalah acara perbincangan yang bertujuan untuk tukar menukar pendapat serta diselengi dengan show yang ada relevansinya dengan topik perbincangan, dimana penyaji siaran bertindak sebagai pengantar, dan sekaligus mengambil peranan aktif tanpa menarik suatu kesimpulan (J.B.Wahyudi,1996: 135)

Tenaga Ahli

Pengertian tenaga ahli adalah orang yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris (saya sering meningkatnya dengan PAAD KNPA) dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan (PER-31 pasal 2 ayat 1 huruf d angka 1 dan pasal 3 huruf c angka 1).

Tenaga Pendukung Operasional

Tenaga kerja yang membantu tenaga ahli dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

TEPPA

Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

Tim yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada bulan Desember 2012 yang tertuang dalam aplikasi sistem monitoring data yang berada di bawah naungan sekretaris kepresidenan di Jakarta. Fungsi TEPPA adalah untuk evaluasi dan percepatan realisasi belanja daerah dan perkembangan pengadaan barang/jasa di setiap provinsi dan kabupaten

Terintegrasi

Kesempurnaan atau keseluruhan proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi, di kelompok beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat.

Tim Sukses

Tim sukses merupakan sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan masing-masing calon kandidat yang di usungnya

Tipikor

Tindak Pidana Korupsi

Suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum

TOR

Term Of Reference

Bahasa Inggris dari KAK (Kerangka Acuan Kerja) yaitu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan

TPS

Tempat Pemungutan Suara

Tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara

Trilateral Meeting

"Pertemuan antara Kementerian Negara PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian/Lembaga yang diadakan untuk mensinkronisasikan program, kegiatan prioritas dan pagu indikatif

Kementerian/Lembaga untuk Tahun Anggaran yang telah ditentukan"

Triwulanan

Waktu tiga bulan

Tugas Pembantuan

Penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tunjangan Kinerja

Remunerasi untuk para pegawai beberapa kementerian/lembaga di luar kementerian keuangan yang diberikan berdasarkan kinerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama

TUP

Tambahan Uang Persediaan

Uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung

Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi

Sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan

Twiter

Layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*)

U

UKP4

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Unit Pengawasan dan pengendalian yang dibentuk oleh presiden susilo bambang yudhoyono untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja kabinet Indonesia bersatu II

Ultra Vires

Tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (dalam hal ini perseroan terbatas) yang berada di luar tujuan (dan karena itu di luar kewenangan) badan hukum tersebut

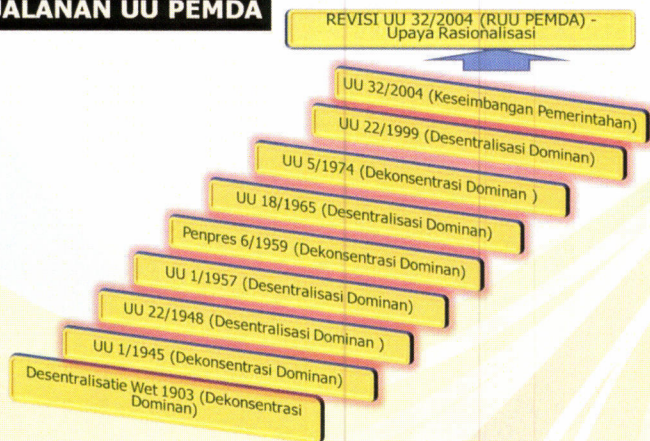
UU**Undang-Undang**

Ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yg mengikat

UU 32/2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah:

PERJALANAN UU PEMDA**UUD****Undang-Undang Dasar**

Suatu bentuk pengaturan tentang berbagai aspek yang mendasar dalam sebuah Negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur

UUD 45

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UP

Uang Persediaan

Sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari hari

UP4B

Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Merupakan fasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan pelatihan ini, akan diikuti utusan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, 29 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan 11 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Update

Memperbaharui file lama dengan file yang lebih baru sehingga akan terus mengalami perubahan baru pada suatu aplikasi (naik level)

Updating Data

Memperbaharui dan merubah data yang lama menjadi data yang terkini

Urusan Pemerintahan

Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Absolut

Bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan hukum dan undang-undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh rakyatnya.

Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, kordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah

Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang berpotensi untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat

Urusan Wajib

Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban

umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

UU

Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden

UUD

Undang-Undang Dasar

Hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik

V

Voting

Lihat Pemungutan Suara

W

Walikota

Kepala daerah untuk daerah kota

Website

Sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya

Website Administrator

Orang yang bertugas untuk memelihara situs web khususnya pada server. Web administrator harus memahami secara mendalam tentang sistem operasi yang digunakan server, proses penginstalan, memahami jaringan LAN, WAN, keamanan data server, dan yang penting dia juga harus dapat mengatasi masalah Troubleshooting

MDGs**Millennium Development Goals**

Tujuan Pembangunan Milenium adalah delapan (8) tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai bangsa pada tahun 2015 untuk menjawab tantangan-tantangan utama pembangunan di seluruh dunia

MDG merupakan komitmen bersama negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam menangani permasalahan utama pembangunan termasuk didalamnya kemiskinan dan hak asasi manusia di dalam satu paket

Widyaswara

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah

Wilayah

Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional

Wilayah Administratif

Lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yg menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah

Workshop

Pelatihan kerja, yang meliputi teori dan praktek dalam satu kegiatan terintegrasi

Yudikatif

Badan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang termasuk memberikan hukuman kepada warga masyarakat yang telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan

TIM PENYUSUN

1. DR. Herbert Siagian, M.Sc
2. Siti Bairiyah, S.Sos
3. Yosef Zulkarnaen, S.STP
4. Rully Hariyudha, SE, M.Si
5. Erita Syahnur
6. Ambat Nainggolan, SE
7. Enthoni, A.MTrU, MM
8. Faisal Ramadhan, S.IP
9. Muhammad Ali, A.Md
10. Trislyna Lisisca, SE
11. Nasren Habeahan, A.Md
12. Iesa Rochim, SE
13. Willy Kurniawan, SH
14. Stevy Yosua Kalalo
15. Wachid Nurrochman
16. Sofyan Hadi Bashari
17. Alpian



